

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin memudahkan terciptanya aplikasi atau terobosan baru salah satunya terkait dengan keuangan. Untuk bisa bertahan, maka akuntansi perlu konsep nilai-nilai dari bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa & bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara, dan semangat mewujudkan negara berdaulat, adil dan makmur (Yuhertiana, 2021: 21). Bela negara tidak hanya didefinisikan dalam bentuk aksi seperti berperang, namun juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya pada bidang ekonomi, kedaulatan ekonomi dapat diartikan sebagai sikap mandiri dimana tidak bergantung pada negara lain untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Salah satu bentuk upayanya adalah melalui penguatan industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas industri jasa keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Industri jasa keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Oleh karena itu diperlukan juga upaya bela negara dari para pelaku usaha di sektor jasa keuangan (OJK Institute, 2022). Salah satunya dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia perlu untuk dicari tahu dalam sisi ketahanan keuangannya, mengingat UMKM

merupakan salah satu pondasi ekonomi di Indonesia. Jika sisi ketahanan keuangan UMKM di Indonesia cukup kuat maka hal tersebut dapat menjadi benteng utama perekonomian bagi negara, dan juga sebagai wujud nyata bela negara dalam ketahanan keuangan negara.

Sebagai bentuk *support* untuk para pelaku UMKM dengan bertepatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI, Bank Indonesia meluncurkan *Quick Response Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard* (QRIS). Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung smenagat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang pasti sebagai salah satu upaya negara dalam bentuk bela negara (Bank Indonesia, 2019). Sehingga peran seluruh masyarakat dan khususnya para pelaku UMKM adalah dengan menggunakan sistem pembayaran digital QRIS dalam kebutuhan sehari-hari, sebagai implementasi bela negara cinta tanah air karena menggunakan teknologi digital dalam hal sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Definisi sistem pembayaran yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap

pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir atau *settlement* (Bank Indonesia, 2020). Terdapat 2 bentuk sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran tunai dengan uang cash dan sistem pembayaran non tunai atau digital.

Sistem pembayaran digital mulai ditemukan pada tahun 1871 ketika Western Union meluncurkan transfer dana elektronik (EFT) di AS. Hal ini merupakan pertama kalinya masyarakat bisa membayar barang dan jasa tanpa harus hadir saat proses transaksi. Bentuk pembayaran terus berubah sejak saat itu, termasuk peluncuran kartu kredit modern pertama oleh Bank Of America pada tahun 1958. Hingga pada tahun 1960an AS meluncurkan *Advanced Research Projects Agency Network* (APARNET). Platform ini meletakkan dasar bagi internet untuk membuka jalan bagi evolusi metode pembayaran berikutnya. Pembayaran digital terus berkembang ketika Paypal pertama kali memasuki pasar pada akhir tahun 90an dan menjadikan salah satu penyedia layanan pembayaran pertama yang didirikan secara global (Ayoconnect, 2022).

Pada awal tahun 2000an beberapa perusahaan di Asia juga mulai berusaha mengikuti perubahan teknologi dan memberikan alternatif online dalam melakukan pembayaran. Salah satunya di Indonesia, pembayaran digital dimulai sejak tahun 1980an dengan kartu kredit dan debit. Kemudian pada awal tahun 2000an, Bank Central Asia (BCA) memperkenalkan *e-banking* dan *m-banking*, hingga menjadi salah satu institusi pertama yang memperkenalkan secara alternatif dalam melakukan transaksi keuangan melalui sarana online atau digital. Kemudian hal ini mulai populer pada pertengahan tahun 2010an

hingga berlanjut pada tahun 2015 dengan banyak diluncurkannya dompet digital atau yang biasa dikenal dengan *e-wallet* seperti OVO, GOPAY, dan sebagainya (Ayoconnect, 2022). Pada era ini, sistem pembayaran basis digital menambah model, variasi, hingga interaksi pembayaran, seperti QR kode yang digunakan oleh seluruh *e-wallet* maupun *m-banking* di Indonesia. Namun dengan banyaknya QR kode yang diterbitkan menyebabkan setiap *merchant* harus menyediakan beberapa layanan QR kode sebanyak jumlah *e-wallet* maupun *m-banking* yang tersedia (Palupi et al., 2020). Selain itu menyebabkan konsumen juga harus memiliki berbagai aplikasi untuk dapat melakukan pembayaran digital tersebut.

Dengan isu tersebut, Bank Indonesia bergerak dengan menerapkan standar QR kode pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital berbasis *shared delivery channel* atau bisa disebut dengan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*). Kantor Pusat Bank Indonesia secara perdana meluncurkan QRIS serentak dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah-daerah. QRIS mulai wajib digunakan per tanggal 1 Januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran berbasis digital di Indonesia yang difasilitasi dengan QR kode (Nugroho, 2023). QRIS dapat digunakan melalui aplikasi dompet digital maupun *mobile banking*. Jika sebelumnya setiap *merchant* harus menyediakan berbagai QR kode dari masing-masing *e-wallet* dan *m-banking* kini *merchant* hanya perlu menyediakan satu QR kode saja, yaitu QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank Indonesia berharap seluruh

masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk digunakan di seluruh toko, warung, UMKM, tiket wisata, dan juga sebagainya.

Bank Indonesia mencatat perkembangan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Tanah Air semakin baik dari hari ke hari. Penggunaan QRIS di kalangan UMKM pun semakin meningkat. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Bapak Dicky Kartikoyono mengungkapkan tercatat per tanggal 11 Oktober 2023 jumlah transaksi di kalangan UMKM sebesar 1 Miliar transaksi, dengan mencapai 81% dari total keseluruhan transaksi dari QRIS. Kemudahan dan ragam fitur QRIS mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta konektivitas pembayaran antarnegara. Saat ini QRIS telah dijalankan di Thailand dan Malaysia, dan kedepannya akan diencanakan agar QRIS dapat digunakan di China, India, dan Jepang. Konektivitas ini akan menopang transaksi pariwisata, UMKM, dan lainnya. Hal ini menguntungkan baik pengguna maupun pedagang, khususnya untuk sektor UMKM. Dari data Bank Indonesia, pada data per Juni 2023 QRIS telah mencapai 26,7 juta *merchant*, dengan 91,4% dari jumlah itu adalah UMKM (Nugroho, 2023).

*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai *game changer* pembayaran digital yang merupakan kebijakan Bank Indonesia (BI), meraih penghargaan Indonesia *Recognition og Excellence* 2023 oleh OpenGov Asia, di Jakarta pada bulan agustus 2023 lalu. Organisasi Internasional OpenGov Asia menilai QRIS telah berdampak pada transformasi digital yang bermanfaat

bagi masyarakat. QRIS dipandang sebagai *powerful tool* yang dapat mendukung digitalisasi dan integrasi regional (Bank Indonesia, 2023).

Perlahan – lahan seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerapkan sistem pembayaran digital QRIS sebagai implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada saat ini tidak hanya pada sektor UMKM yang menerapkan QRIS, melainkan segala sektor mulai menerapkan sistem pembayaran digital QRIS khususnya pada Kota Surabaya. Saat ini di Surabaya pada sektor transportasi umum Surabaya Bus telah menerapkan pembayaran QRIS dan melakukan kampanye dengan menuliskan hal tersebut pada desain luar Bus Surabaya. Hal ini merupakan sebuah implementasi bela negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap pembaruan teknologi dari Indonesia dan juga sebagai cara Pemerintah Kota Surabaya agar masyarakatnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang serba digitalisasi. Karena pembayaran digital ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran secara efektif. Kemudian dalam sektor pariwisata di Kota Surabaya juga telah menerapkan pembelian tiket dengan pembayaran digital melalui QRIS. Selain itu kebijakan Walikota Surabaya Bapak Eri Cahyadi menerapkan pembayaran parkir dilakukan dengan non-tunai dan hanya bisa dilakukan dengan scan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), *voucher*, atau parkir berlangganan mulai bulan Februari 2024 (Syarief, 2024)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ningsih dkk, menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan secara sendiri-sendiri

(parsial) maupun bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS (Ningsih et al., 2021). Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Sudiatmika & Martini bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan merchant QRIS bagi pelaku UMKM (Sudiatmika & Martini, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Palupi dkk juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif atau signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS pada pelaku UMKM (Palupi et al., 2020). Dari beberapa penelitian yang ada persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan QRIS, namun bisa saja hal yang berbeda dapat terjadi pada UMKM di Surabaya yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Manfaat, Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital Pada UMKM Di Surabaya”** dengan maksud mencari tahu mengenai ketahanan keuangan UMKM di Surabaya sebagai implementasi akuntansi bela negara.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya?
2. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya?
3. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya
2. Untuk mengetahui apakah persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya
3. Untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis bagi para pembacanya seperti teori *Technology acceptance model* (TAM) yang merupakan teori dari penerimaan teknologi baru dan yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian memberikan informasi juga mengenai pengaruh literasi keuangan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital pada UMKM di Surabaya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **A. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai sistem pembayaran digital dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah ilmiah.

#### **B. Bagi Pembaca**

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas bagi pembaca mengenai penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

### C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau acuan tambahan informasi serupa ketika melakukan penelitian terkait serta untuk dikembangkan lebih lanjut.